

INTISARI

Tesis ini mengkaji tentang kegagalan pembangunan negara melalui intervensi atau yang disebut SBI di Afghanistan menggunakan pendekatan legitimasi sosial. Desain aturan dan sistem pemerintahan yang dibangun dan kekuasaan yang tidak menghasilkan kepercayaan, nilai, dan kepentingan publik membentuk respon ketidakpercayaan dan penarikan loyalitas yang membentuk defisit legitimasi. Sejak era Hamid Karzai, erosi legitimasi sosial telah terjadi karena konfigurasi kekuasaan neo-patrimonial mendorong dominasi jaringan patronase yang berkelindan dengan desain presidensial yang sentralistik berdampak pada lahirnya impunitas hukum dan kebijakan keamanan dan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan para elite. Pola degradasi legitimasi sosial ini berlanjut dan memburuk di era rezim Ghani karena menguatnya sentimen etnosentrisme, lemahnya kualitas demokrasi, dan merosotnya akuntabilitas publik. Perundingan AS dengan Taliban dan penarikan pasukan militer asing melemahkan kapasitas keamanan Afghanistan dan membuka ruang bagi Taliban untuk mengkonsolidasikan dukungan melalui kombinasi eskalasi militer dan tata kelola pemerintahan bayangan. Defisit legitimasi sosial Ghani dimanfaatkan oleh Taliban untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat dengan institusi dan layanan yang dibangunnya sehingga mampu mengambil alih kekuasaan Afghanistan tanpa perlawanan berarti. Tesis ini berkontribusi pada perdebatan SBI dengan menegaskan bahwa ketahanan rezim tidak hanya dapat dijelaskan melalui kapasitas institusional dan desain demokrasi, melainkan bergantung pada dinamika relasi negara-masyarakat berupa kepercayaan, loyalitas, serta penerimaan sosial. Secara praktis, tesis ini menekankan perlunya desain intervensi yang memprioritaskan pembangunan basis legitimasi sosial dalam SBI.

Kata Kunci: Pembangunan negara melalui intervensi (SBI), Legitimasi Sosial, Afghanistan, Taliban.

ABSTRACT

This thesis examines the failure of the SBI in Afghanistan using a social legitimacy approach. The design of rules and systems of government established and the power that do not generate public trust, values, and interests create a response of distrust and withdrawal of loyalty, which forms a legitimacy deficit. Since the Hamid Karzai era, the erosion of social legitimacy has occurred because the neo-patrimonial power configuration encourages the dominance of patronage networks intertwined with a centralized presidential design, resulting in legal impunity and security and economic policies oriented towards elite interests. This pattern of social legitimacy degradation continued and worsened under the Ghani regime due to strengthening ethnocentric sentiments, weakening democratic quality, and declining public accountability. US negotiations with the Taliban and the withdrawal of foreign military forces weakened Afghanistan's security capacity and opened up space for the Taliban to consolidate support through a combination of military escalation and shadow governance. The Taliban exploited Ghani's social legitimacy deficit to gain public support and trust with the institutions and services it built, enabling it to seize power in Afghanistan without significant resistance. This thesis contributes to the SBI debate by emphasizing that regime resilience cannot be explained solely by institutional capacity and democratic design, but rather depends on the dynamics of state-society relations, such as trust, loyalty, and social acceptance. Practically, this thesis emphasizes the need for intervention designs that prioritize building a basis for social legitimacy within the SBI.

Key Word: State-Building Intervention (SBI), Social legitimacy, Afghanistan, Taliban.